

BAB II

FENOMENA INVESTASI JEPANG

2.1. Jepang dan Investasi

Jepang mulai menunjukkan keberadaannya sebagai salah satu investor utama dunia pada tahun 1950an. Ini berlangsung hingga 1960an dengan skala investasi yang terbatas. Hal tersebut terjadi dikarenakan dua hal, yaitu: (Sekiguchi, 1979) 1. Hancurnya sumber manajerial perusahaan-perusahaan pada masa Perang Dunia II. Selanjutnya pada tahun 1945-1960an Jepang berusaha mengejar ketertinggalan industrinya dengan mengimpor teknologinya dan mencari pinjaman modal kepada negara lainnya sebagai usaha membangun kembali perekonomiannya, 2. Jepang baru mampu menyerap tenaga kerjanya secara penuh bagi lapangan pekerjaannya pada tahun 1960an. Keadaan ini menimbulkan fenomena baru dimana mulai terbatasnya kuantitas tenaga kerja bagi sektor perekonomian Jepang.

Dibalik terdapatnya kedua hal tersebut, tentunya ada latar belakang ataupun alasan mengapa Jepang melakukan investasinya ke luar negeri. Pada bagian tersebut akan dijabarkan mengenai penjelasan hal tersebut.

2.2. Latar Belakang Jepang Sebagai Negara Investor

Ekonomi Jepang menghadapi berbagai keadaan penting, yang pertama adalah ketika ekonomi Jepang memperoleh sukses dalam pertumbuhan yang cepat di bidang industri berat dan kimia tahun 1965, serta peningkatan ekspor dari tahun 1972-1973. Akan tetapi dibalik kesuksesan tersebut timbul masalah, yaitu dalam menentukan

struktur industri dan perdagangan yang bagaimanakah harus digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekonomi.

Yang kedua keberhasilan ekonomi setelah perang dunia, dimana terjadi pertumbuhan yang cepat oleh kepemimpinan yang kuat dari Amerika Serikat, dalam kesuksesan melakukan liberalisasi dalam perdagangan serta pertukaran dan investasi dari kebanyakan negara-negara industri melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan IMF. Melalui ini Jepang banyak memperoleh *benefit* terhadap peningkatan industrinya. Tetapi pada awal tahun 1970, keadaan ekonomi yang menyenangkan ini telah mengelilingi system keuangan dan perdagangan berubah jadi tidak menentu serta terjadi kekacauan dan keadaan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, Jepang harus mengambil tindakan sebagai pemimpin yang positif untuk memperoleh *benefit* ataupun manfaat dari ekonomi negara-negara tetangga.

Di Indonesia sendiri pada saat itu terdapat larangan pemerintah untuk pembatasan gerak investasi Jepang. Ini pula yang menghambat perkembangan investasi Jepang. Kondisi tersebut berkaitan dengan defisitnya neraca pembayaran Jepang yang didasari oleh faktor perhitungan ekonomi. Tetapi situasi ini berubah sejak tahun 1968 karena Jepang sudah mulai memperlihatkan kestabilan dalam nilai surplusnya yang diikuti tahun berikutnya dengan peningkatan pesat pada GNP-nya yang mencapai 10,8% (Sekiguchi, 1979).

Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai langkah menumbuhkan perekonomiannya adalah kondisi pertumbuhan Jepang berkaitan dengan keterbatasannya memiliki lahan. Dalam dunia industri, ketersediaan lahan yang luas sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan usaha industri. Padahal, sarana

kondusif atas luasnya lahan sangat terbatas di wilayah Jepang. Dataran di wilayah Jepang sangatlah kecil, karena kontur geografisnya diwarnai oleh pegunungan dan perbukitan. Jepang mempunyai banyak pegunungan, 77 diantaranya adalah gunung berapi yang masih aktif sehingga Jepang terkenal dengan daerah yang sering dilanda gempa. Daerah pegunungan Jepang sendiri mencapai 70% dari keseluruhan wilayah, sehingga daratannya tidak luas sementara mayoritas penduduk tinggal di daratan.

Ketersediaan lahan daratan di Jepang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri, tetapi masyarakatnya juga membutuhkan tempat tinggal. Lahan industri pun menjadi kian terbatas. Oleh karena itulah, tingkat harga lahan Jepang menjadi sangat tinggi. Ini mengakibatkan masalah besar terhadap sektor ekonomi. Tidak hanya masalah pada lahan, tetapi juga berdampak pada biaya faktor produksi yang ikut menjadi tinggi.

Sumber produksi menjadi masalah lain pada pembangunan industri di Jepang. Pengembangan tidak hanya memerlukan lahan yang luas tetapi juga sumber produksi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya alam. Perkembangan investasi Jepang memiliki signifikansi tinggi terhadap sumber daya alam karena Jepang tidak mempunyai ketersediaan dan juga kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan atas sumber produksinya. Jepang mau tidak mau harus mengimpor sumber daya produksi dari luar negeri. Bahannya pun beragam, antara lain minyak mentah, batu bara, *antimony*, mangan, timah, nikel, kobalt dan bauksit dalam jumlah yang besar. Selain itu Jepang banyak mengimpor mineral-mineral non logam seperti brom, fosfat, garam kalsium, magnesit, nitrat beserta serat-serat alam seperti katun, wol yang semuanya dipasok dari negara lain (Sing, 2002).

Jepang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya mineral dan energi pokok lebih dari 80% (Sing, 2002). Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan ketergantungan Jepang terhadap pasokan komoditas secara kontinuitas yang terutama dalam sektor industri dan energi. Dengan adanya keterbatasan permasalahan-permasalahan yang dimiliki Jepang seperti sumber daya alam dan manusia, seperti halnya pada lahan, menghadapkan Jepang pada situasi untuk mencari alternatif lain bagi pengadaan proses produksi atas sektor industri. Investasi ke luar negeri menjadi suatu jalan bagi Jepang untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Hal berikutnya yang menjadi motivasi Jepang untuk berinvestasi ke luar negeri adalah adanya tekanan ekonomi dari dunia internasional akibat lemahnya kemampuan Jepang untuk pemenuhan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat menjadi sebab terjadinya tekanan internasional dari negara-negara Barat seperti, Amerika dan Eropa.

Hubungan perdagangan Jepang yang telah mengalami surplus dengan negara Barat telah terjadi sejak tahun 1960-an. Selanjutnya di tahun 1970-an Jepang mengalami peningkatan perdagangan yang seimbang dengan Amerika Serikat seiring dengan pengadaan langkah-langkah peningkatan perekonomian Asia. Akibat dari peningkatan friksi perdagangan Jepang inilah yang menimbulkan protes berbagai negara barat. Mereka menuntut Jepang untuk mengurangi tingkat perdagangan Jepang yang semakin meningkat. Tindakan yang dapat Jepang lakukan adalah mengurangi jumlah pendapatan Jepang atau mengimpor produksi dari negara barat. Selanjutnya, Jepang akhirnya cenderung memilih untuk mengurangi jumlah pendapatannya.

Jumlah pendapatan yang berusaha dikurangi oleh Jepang dilakukan dengan cara mengadakan investasi ke luar negeri. Investasi ini dilakukan melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang. Kebijakan investasi Jepang sendiri mengalami perubahan dengan meliberalisasikan sektor investasi secara bertahap pada tahun 1969-1972. Dampak dari liberalisasi ini adalah menghasilkan pertumbuhan investasi Jepang dalam jumlah yang sangat besar dengan pemcapaian US\$ 3,9 milyar di tahun 1970, dimana sebelumnya pada tahun 1965 investasinya hanya sebesar US\$ 0,9 milyar. Peningkatan ini disusul dengan jumlah investasi yang lebih besar lagi yaitu US\$ 15,9 milyar di tahun 1975, yang kemudian terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Pada bulan September 1985 telah terjadi persidangan menteri-menteri keuangan dunia, yang disebut juga negara-negara G-5 di New York. Sidang diselenggarakan akibat telah terjadi kemelesetan nilai tukar uang antara Yen (Jepang) dengan Dollar (Amerika). Salah satu strategi perusahaan besar Jepang sejak nilai pertukaran Yen dengan Dollar Amerika dinaikan pada tahun 1985 adalah dengan melakukan penanaman modal asing. Yaitu dengan membuka pabrik-pabrik di negara-negara asing untuk memproduksi produk-produk mereka. Nilai Yen yang semakin tinggi sudah tentu akan dapat menurunkan persaingan ekspor antara perusahaan-perusahaan besar Jepang, seperti: industri automobile, barang-barang elektronik, kilang-kilang pemasangan kendaraan dan sebagainya.

Pengadaan investasi asing dapat berarti memindahkan proses produksi barang ke negara lain. Hal ini terjadi pula pada investasi Jepang. Pengurangan pendapatan Jepang memang ada dikarenakan produksi investasi Jepang tersebut juga

merupakan produksi negara penerima investasi Jepang. Sehingga pada dasarnya pengurangan pendapatan tidak terjadi, tetapi hanya dialihkan atau ditransfer ke dalam bentuk yang lain. Langkah pengurangan pendapatan dilakukan untuk dapat menyeimbangkan kekuatan perdagangan terhadap negara-negara Barat, oleh karenanya diharapkan hubungan perekonomian dengan negara Barat dapat tetap terjaga baik.

Gerakan Jepang yang terbatas untuk terus mengembangkan potensi ekonominya di negara Barat memberi kesempatan pada Jepang untuk menggeser ekspansi industrinya. Pilihan beralih ke wilayah Asia, khususnya ASEAN. Keinginan Jepang untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dimulai pada tahun 1970-an dengan adanya doktrin Fukuda. Kebijakan-kebijakan ekonomi Jepang juga digencarkan sebagai wujud atas ingin ditingkatkannya perekonomian negara-negara ASEAN melalui peningkatan investasi asing oleh Jepang.

ASEAN memiliki banyak potensi sumber daya yang berkembang, antara lain sumber daya alam dan manusia sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi Jepang. Terlebih lagi pada wilayah Indonesia, dimana ada sumber daya alam, manusia dan potensi pasar yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. Hal ini terus berkembang hingga tahun 1980-an dengan meresponnya perusahaan Jepang untuk terus mengadakan relokasi industri keluar negeri. Oleh karenanya di tahun 1980-an itulah menjadi masa awal sebagian besar perusahaan Jepang untuk meningkatkan nilai investasinya yang bertujuan sebagai strategi bersifat global, investasi berfasilitas produksi, jaringan distribusi, fasilitas atas penelitian dan pengembangan produk di berbagai kawasan di dunia. Selain itu, dalam permasalahan

domestiknya, Jepang mendapat tekanan pula dari luar unruk dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya untuk berinvestasi ke luar negeri.

Dalam kebijakan luar negeri Jepang, dikenal istilah adanya pemisahan antara politik dan ekonomi (*seikei-bunri*). *Seikei-bunri* mengandung arti bahwa peran politik Jepang di ASEAN sangat terkait dengan kepentingan ekonomi Jepang.

ASEAN selama ini telah dipersiapkan Jepang sebagai kawasan tujuan ekspor, tujuan investasi, dan sumber bahan baku bagi industri Jepang (Tanaka, 2007). Semua aspek-aspek tersebut, mendasari Jepang untuk lebih meningkatkan peran ekonominya dalam perdagangan, bantuan pembangunan pemerintah (*Official Development Aid /ODA*), dan sumber investasi langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*). Ketiga elemen diatas, telah membawa Jepang menjadi salah satu mitra dagang utama bagi ASEAN, sumber terbesar ODA dan sumber FDI (Pop, 2007).

2.2.1. Perdagangan

Hubungan perdagangan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN telah berlangsung jauh sebelum ASEAN dibentuk. Adapun yang melatar belakangi hubungan dagang Jepang-ASEAN antara lain: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan energi. Sebagai negara yang berbasis industri, Jepang sangat miskin akan sumber daya industrial. Untuk itu, Jepang memerlukan pasokan produk-produk pertambangan yang banyak terdapat di negara-negara ASEAN. Kedua, keinginan Jepang untuk mengembangkan wilayah pemasaran hasil industrinya. Negara-negara ASEAN yang cakupan wilayahnya begitu luas menjadi pasar yang potensial bagi Jepang. Selama ini, negara-negara ASEAN merupakan pelanggan

utama dari produk-produk buatan Jepang seperti elektronik, peralatan, permesinan, maupun kendaraan dalam jumlah besar. Konsistensi produk-produk Jepang dengan harga terjangkau dan berkualitas tinggi, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen di negara-negara Asia.

Meningkatnya upah buruh dan mahalnya biaya produksi domestik menjadi alasan Jepang untuk merelokasi industrinya dan membuka MNC (Multinational Corporation) di sejumlah negara-negara ASEAN. Tujuannya agar upah buruh dan biaya produksi menjadi lebih murah sehingga produk buatan Jepang semakin kompetitif untuk dipasarkan (Hadi, 2005).

2.2.2. Official Development Aid (ODA)

Bantuan pemerintah Jepang atau yang biasa dikenal dengan sebutan ODA merupakan kebijakan Perdana Menteri Hayato Ikeda (1960-1964). Sejak era 1960-an, ODA Jepang telah memberikan bantuan ke berbagai negara berupa bantuan luar negeri (tanpa kompensasi) dan pinjaman. Bantuan tanpa kompensasi diberikan untuk human security, bencana, dan bantuan budaya. Sedangkan pinjaman diberikan untuk pembangunan infrastruktur (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2010). Kontribusi ODA Jepang begitu efektif untuk mempromosikan kepentingan ekonominya di kawasan. Secara perlahan namun pasti, ODA menjadi instrumen paling penting dalam dalam kebijakan luar negeri Jepang dan menempatkannya menjadi salah satu pendonor terbesar di dunia (Wang, 1993).

Terdapat empat karakteristik dalam melihat bantuan ODA Jepang, Pertama, dibandingkan dengan pendonor global lainnya, porsi terbesar dari total bantuan ODA

Jepang diberikan dalam bentuk pinjaman langsung (direct loan). Kedua, pinjaman langsung ini dikaitkan dengan syarat membeli barang dan jasa dari Jepang. Ketiga, distribusi bantuan ODA Jepang lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan pembangkit tenaga listrik. Keempat, secara target regional, 60-70 % diberikan untuk kawasan Asia (Wang, 1993).

Pemberian ODA Jepang diberikan melalui dua cara, yakni bilateral dan multilateral. Sejak pertengahan awal tahun 1960, ODA Jepang telah menyalurkan bantuan secara bilateral ke negara-negara ASEAN sejumlah US\$200-400 juta dan meningkat tajam menjadi US\$1,3 miliar diakhir periode. Pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Jepang pertama, Perdana Menteri Fukuda juga memberikan bantuan keuangan sejumlah US\$1 miliar untuk negara-negara ASEAN guna menstabilisasi perekonomian negara-negara ASEAN sekaligus mencegah masuknya pengaruh komunis China, khususnya di Burma (Myanmar) dan Indonesia (Shoji, 2009).

Negara-negara ASEAN menerima bantuan terbesar dari ODA Jepang. Dari total keseluruhan dana ODA sejumlah US\$7.5 milyar pada tahun 2001, US\$2.1 milyar diberikan untuk ASEAN (Japan Times, 2003). Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia mendapat bagian terbesar dari ODA Jepang. Pada tahun 2009, sekitar 43% pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia bersumber dari Jepang. Mengingat pembiayaan utang Indonesia dari ADB (16,8%) dan World Bank (10,8%) juga banyak bersumber dari Jepang, dapat diyakini sekitar 50% utang luar negeri Indonesia bersumber dari Jepang. Sedangkan AS yang sering dianggap mendominasi Indonesia, hanya memberi kontribusi 3,7% dari total utang luar negeri pemerintah Indonesia (Bank Indonesia, 2009).

2.2.3. Foreign Direct Investment (FDI)

Selain menerima bantuan terbesar dari ODA Jepang, ASEAN juga dipersiapkan sebagai kawasan tujuan investasi. Perusahaan-perusahaan Jepang telah menanamkan FDI nya dalam skala besar ke negara-negara ASEAN sejak 1972. Pada tahun 2001, dari total nilai investasi sejumlah 6,8 triliun Yen Jepang di Asia Timur dan Asia Tenggara, 57,1% nya atau 3,9 triliun Yen berada di ASEAN, dan sisanya sekitar 21,5% untuk China Daratan (Japan Times, 2003).

Pada tahun 2004-2008, dari total FDI negara-negara di luar ASEAN, Jepang memberikan kontribusi paling besar. Bahkan, FDI Jepang jumlahnya dua kali lipat lebih besar dari FDI AS di ASEAN (Lihat Gambar 1).

Gambar 2. 1 Sepuluh Negara dengan FDI terbesar ke ASEAN

Negara/kawasan	Nilai				Porsi terhadap Total Arus FDI			
	2006	2007	2008	2006-2008	2006	2007	2008	2006-2008
Uni Eropa	10,672.2	18,481.0	13,057.3	42,210.5	19.4	26.4	21.9	22.9
ASEAN	7,596.0	9,461.7	10,831.0	27,888.7	13.8	13.5	18.1	15.1
Jepang	10,229.6	8,382.0	7,156.9	25,768.5	18.6	12.0	12.0	14.0
AS	3,418.5	6,345.6	3,012.5	12,776.6	6.2	9.1	5.0	6.9
Negara Kepulauan Cayman	3,514.1	787.2	2,537.0	6,838.3	6.4	1.1	4.2	3.7
Amerika Tengah dan Selatan	3,720.0	2,109.5	957.4	6,787.0	6.8	3.0	1.6	3.7
Bermuda	1,324.9	2,777.7	2,122.1	6,224.8	2.4	4.0	3.6	3.4
Korea Selatan	1,253.8	3,035.0	1,588.7	5,877.4	2.3	4.3	2.7	3.2
China	1,016.2	1,574.4	1,437.2	4,027.7	1.8	2.3	2.4	2.2
Hong Kong	1,278.8	1,671.3	712.2	3,662.3	2.3	2.4	1.2	2.0
Total Sepuluh Negara Terbesar	44,024.2	54,625.4	43,412.1	142,061.7	80.1	78.1	72.7	76.9
Lainnya	10,955.7	15,313.4	16,288.7	42,557.7	19.9	21.9	27.3	23.1
Total FDI ke ASEAN	54,979.9	69,938.8	59,700.8	184,619.5	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: ASEAN FDI Statistic Database, 2009

(nilai dalam Dolar AS Juta; porsi dalam persen)

2.3. Hubungan Bilateral Jepang dan Indonesia

Melihat kilas balik sejarah antara Jepang dan Indonesia yang tidak terlalu baik karena penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia, saat ini kedua negara telah memperbaiki dan membina persahabatan yang erat berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar 11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih dari 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana berkerja 300.000 orang Indonesia.

hubungan bilateral antar kedua negara dibuka pada bulan April 1958 dengan pendatanganan “Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia”. Pada tahun yang sama ditandatangani pula “Perjanjian Pampasan Perang”. Hubungan Jepang-Indonesia pasca perang dua II dimulai dengan realisasi perjanjian Pampasan Perang sebesar US\$223 juta dalam bentuk barang dan jasa selama 12 tahun mulai 1958, ditambah US\$400 juta dalam bentuk pinjaman selama 20 tahun (Masuyama, Vandenbrink, & Yue, 2001). Karena barang dan jasa harus buatan Jepang, maka perusahaan-perusahaan Jepang bersaing untuk memperoleh kontrak dengan berbagai cara dengan melobi pemerintah Indonesia dan melibatkan politisi Jepang untuk mendapatkan kontrak itu.

Dalam hubungan Jepang dengan Indonesia yang paling menonjol adalah hubungan ekonomi terutama penanaman modal, bantuan ekonomi dan perdagangan

luar negeri antara kedua negara. Jika ditelaah, posisi Jepang yang dominan yaitu sebagai: 1) Kreditor, 2) mitra dagang, dan 3) investor terbesar bagi Indonesia. Dalam tahun 1995, Indonesia mengimpor sebesar US\$ 9,98 milyar, dengan mengekspor sebesar US\$ 14,2 milyar (Widyahartono, 1996). Indonesia selama ini mengalami surplus dalam perdagangan dengan Jepang, lebih dari separuhnya impor Indonesia dari Jepang terdiri dari mesin (*machinery*), sedangkan sekitar 50 persen impor Jepang terdiri dari minyak dan gas (*migas*).

Sampai sekarang ini Jepang tetap merupakan investor terbesar di Indonesia dan pemberi bantuan terbesar (*largest donor*). Kozuke Mizuno dalam Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia pada Masa Orde Baru dan Peralihan Sumber Daya Manusia (Oktober 1995). menyatakan bahwa penanaman modal Jepang di Indonesia tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun sejak beberapa tahun ini keberadaan penanaman modal Jepang lebih proposional dimana perusahaan swasta nasional Indonesia meningkat perananannya (Widyahartono, 1996). Selain itu makin disadari meningkatnya penanaman modal dari Negara Industri Baru Asia yaitu Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura.

Dari 1967 (awal Orde Baru) sampai 1994, Jepang tetap merupakan investor terbesar dengan nilai investasi sebesar US\$ 15,66 milyar sekalipun terdapat penurunan dalam tahun 1993. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan investasi dari Korea Selatan untuk periode sama yaitu US\$ 5,44 milyar dari Taiwan sebesar US\$ 6,57 milyar (Widyahartono, 1996). Tidak hanya sampai tahun 1994 saja, bahkan sampai tahun 2007, Jepang masih menjadi negara investor urutan pertama di Indonesia.

Pada tabel terakhir, menunjukkan bahwa Jepang menjadi negara investor yang penting atas posisinya dalam urutan teratas lewat daftar lima besar FDI di Indonesia. Bagaimanapun akumulasi penanaman modal Jepang yang tetap paling besar di Indonesia, sangat mendorong perkembangan industrinya, seperti permobilan, aluminium, peralatan elektronik, *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan sebagainya.

Jepang terus berkibar sebagai salah satu negara kontributor utama investasi asing yang masuk di Indonesia. Hal ini ditandai dengan rencana investasi yang dibukukan oleh Jepang selama tahun 2015 di Indonesia. Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai rencana investasi dari Jepang mencapai Rp 100,6 triliun, dibawah RRT (Rp 277 triliun) dan Singapura (Rp 203 triliun). Capaian rencana investasi Jepang tersebut berarti naik 130% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang berada diposisi Rp 43,7 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian khusus terhadap investasi yang datang dari Jepang. “Kehadiran enam Gubernur prefektur Jepang di Indonesia selama tahun 2015, kunjungan setingkat menteri yang dilakukan oleh kedua negara, serta komunikasi antara kedua pemimpin negara memiliki andil yang cukup positif untuk menciptakan suasana yang kondusif,” ujarnya dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada pers, hari ini (6/1).

Franky menjelaskan bahwa meskipun secara nominal nilai rencana investasi dibawah RRT, rasio rencana investasi dengan realisasi investasi dari Jepang cukup tinggi dengan posisi di level 60%. “Rencana investasi RRT memang terpaut cukup signifikan, namun rasio realisasi Jepang lebih tinggi, sehingga rencana investasi yang

masuk ekspektasi untuk direalisasikan menjadi investasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dari RRT,” ungkapnya.

Salah satu langkah strategis BKPM adalah melakukan penyegaran dengan melakukan kocok ulang di tim Marketing Officer BKPM. “Jepang dan RRT termasuk negara-negara prioritas yang diharapkan tim MO tersebut dapat membantu melakukan identifikasi minat investasi baru serta mendorong investor untuk memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam yang telah diluncurkan oleh BKPM,” jelasnya.

Selama ini, Franky menambahkan bahwa meskipun banyak investor Jepang yang telah menanyakan mengenai layanan izin investasi 3 jam, namun belum ada investor Jepang yang memanfaatkan layanan tersebut. “Ini akan terus kami dorong dan sosialisasikan sehingga investor-investor potensial termasuk dari Jepang dapat memanfaatkan layanan izin investasi cepat tersebut,” paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah investasi. Di bidang layanan perizinan investasi, setelah melakukan layanan perizinan online dan peluncuran PTSP Pusat, juga diluncurkan layanan izin investasi 3 jam dengan 8 produk AnD perizinan plus surat keterangan booking lahan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang diharapkan mendorong investasi.

Dari data yang dirilis oleh BKPM menunjukkan pengajuan izin prinsip periode Januari-28 Desember 2015 mencapai Rp 1.886,04 triliun, naik 45,29% dibanding pengajuan izin prinsip tahun 2014 sebesar Rp 1.298,1 triliun. BKPM mencatat rencana investasi PMA periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp

1.136,36 triliun atau naik 18,06% dibandingkan rencana investasi PMA tahun 2014 sebesar Rp 962,5 triliun. Sedangkan, rencana investasi PMDN periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp 749,68 triliun atau naik hingga 123,32% dibandingkan rencana investasi PMDN tahun 2014 sebesar Rp 335,7 triliun.

Banyak Perusahaan Multinasional Jepang yang membuka cabang dan membangun industri di Indonesia. Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan kutipan yang didapat dari BPKM, perusahaan-perusahaan Jepang mempekerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia. Ini menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor satu di Indonesia (Kedutaan Besar Jepang, n.d.).

Provinsi Jawa Barat berkontribusi besar menghasilkan devisa negara. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.10, penjualan ekspornya 20.6 persen dibeli oleh negara ASEAN, USA sebesar 19.9 persen, Eropa sebesar 14.3 persen, Jepang sebesar 11 persen, dan Tiongkok sebesar 4.9 persen. Sementara itu, kondisinya terbalik bila dilihat dari permintaan impor pada Gambar 3.11. Sebesar 25.6 persen permintaan impor Jawa Barat berasal dari negara Tiongkok, 18.6 persen dari Negara ASEAN, 17.5 persen dari Korea Selatan, 16 persen dari Jepang, dan 4.6 persen dari Eropa. Perolehan dolar dari ekspor impor tersebut akan lebih besar, sehingga akan berkontribusi pada penguatan rupiah terhadap dollar (Bappeda Jabar, 2017).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 20 perusahaan perakitan mobil dan diantaranya terdapat tujuh pabrik perusahaan ternama Jepang yang berhubungan dengan 150 industri komponen pada lapis pertama, dan 350 industri komponen lapis kedua. Salah satunya adalah Toyota Motor Corporation

(TMC), merealisasikan investasi pembangunan pabrik perakitan kendaraan (*complete knock-down/CKD*) di Karawang, Jawa Barat. Pabrik kedua yang akan beroperasi di bawah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menyerap investasi sebesar Rp 3,3 triliun, 25% dari total komitmen investasi Toyota Motor Corp di Indonesia yang sebelumnya membangun pabrik di kawasan Sunter, Jakarta Utara (Kedutaan Besar Jepang, n.d.).

